



Strategies and Challenges of Inclusive Education in Indonesia

Strategi dan Tantangan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Ananda Asti Putri[✉], Syaid Ali Jailani

Universitas Jambi, Indonesia

✉ ananda3311e@gmail.com

Received: 11-06-2024

Revised: 17-06-2024

Accepted: 17-06-2024

ABSTRACT

This study aims to identify the main challenges in implementing inclusive education in Indonesia and offer solution strategies to overcome them. The research method used is a literature review by analyzing relevant sources such as journals, books, and other literature. The research findings identify several main challenges, including a lack of supporting facilities for the inclusive system, limited teacher competence, a curriculum that has not accommodated student diversity, negative societal stigma, inadequate school management, and a lack of collaboration among stakeholders. The recommended solution strategies include providing accessible infrastructure, increasing teacher capacity through continuous training, developing an inclusive curriculum, campaigning to raise public awareness, government support in providing resources, and cooperation and synergy among various related parties. This research concludes that optimizing the implementation of inclusive education requires strong commitment and collaboration from all stakeholders. efforts to realize equal, quality and non-discriminatory education for all children, including children with special needs. The government needs to allocate an adequate budget for the development of accessible infrastructure, training of teaching staff, and provision of other supporting facilities. Apart from that, the government can also form a special agency or task force tasked with coordinating, monitoring and evaluating the implementation of inclusive education throughout Indonesia.

Keywords: *inclusive education, children with special needs, challenges, solution strategies*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia dan menawarkan strategi solusi untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan menganalisis sumber-sumber terkait seperti jurnal, buku, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menemukan beberapa tantangan utama, di antaranya minimnya sarana penunjang sistem inklusif, terbatasnya kompetensi guru, kurikulum yang belum mengakomodasi keberagaman siswa, stigma negatif masyarakat, manajemen sekolah yang kurang memadai, serta kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Strategi solusi yang direkomendasikan meliputi penyediaan infrastruktur aksesibel, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kurikulum inklusif, kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah dalam penyediaan sumber daya, serta kerjasama dan sinergi antar berbagai pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya untuk mewujudkan pendidikan yang setara, berkualitas, dan tidak diskriminatif bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur aksesibel, pelatihan tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat membentuk badan khusus atau satuan tugas yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, tantangan, strategi solusi

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Istilah *pendidikan inklusif* atau *inklusi*, mulai mengemuka sejak tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang diteruskan dengan pernyataan tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.¹

Seiring dengan perjalanan kehidupan sosial bermasyarakat, ada pandangan bahwa mereka anak-anak penyandang *dissabilitas* dianggap sebagai sosok individu yang tidak berguna, bahkan perlu diasingkan. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pandangan tersebut mulai berbeda. Keberadaannya mulai dihargai dan memiliki hak yang sama seperti anak normal lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa Negara memberikan jaminan sebenarnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam pendidikan.

Pemerintah sebagai faktor utama dalam membuat kebijaksanaan pendidikan mengupayakan program pemerataan pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus dan anak normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan hidupnya.²

Permasalahan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan dalam upaya merumuskan solusi agar setiap anak mendapatkan hak dan pelayanan pendidikan terbaik. Salah satu upaya pemerintah adalah menyelenggarakan program pendidikan inklusif yang diberikan melalui sekolah reguler. Pendidikan inklusif mengacu pada prinsip pendidikan untuk semua, di mana akses pendidikan bersifat ramah bagi semua tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), anak berbakat, anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak dari etnis dan bahasa minoritas, serta kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal.³

¹ Ahmad Farhan, "Implementasi Program Pendidikan Inklusi di SD Swasta Dua Mei Jalan Abdul Ghani Ciputat Tangerang Selatan (Studi Kasus Pendidikan Inklusif)," 2022.

² Lia Rosliana dan Rina Hizriyani, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah PAUD," *Motiva: Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2019): 32–36.

³ Muhammad Saiful Anwar, "Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural," *Foundasia* 13, no. 1 (2022): 1–15.

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia telah berjalan lebih dari 10 tahun dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.⁴ Namun, tingkat keberhasilannya di setiap daerah berbeda-beda dan masih memiliki banyak permasalahan. Hanya 18% atau sekitar 299.000 dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang telah mendapatkan layanan pendidikan inklusif.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami fenomena melalui tipe makna, mendekati pemahaman kontekstual, dan kompleksitas kompleksitas manusia dan interaksi mereka.⁶ Dan yang berhubungan dengan proses kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa buku, jurnal, dan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek penelitian sekarang. Pengertian pustaka, disebut juga pustaka kajian, yaitu penerapan teori, referensi, dan literatur akademis lainnya yang berkaitan dengan agama, moralitas, dan norma yang relevan dengan situasi sosial yang diteliti. Metode pengumpulan datanya menggunakan internet dengan mengakses berbagai sumber, antara lain buku dan jurnal penelitian yang terkini dan selaras dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Pendidikan adalah bekal untuk mengejar semua yang ditargetkan oleh seseorang dalam kehidupannya sehingga tanpa pendidikan, maka logikanya semua yang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk dapat diwujudkan.⁷ Pendidikan artinya proses perubahan sikap dan perilaku seseorang

⁴ “Kemendikbudristek Ajak Ekosistem Pendidikan Mendidik Semua Anak Dengan Sepenuh Hati,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 12 Desember 2023, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/12/kemendikbudristek-ajak-ekosistem-pendidikan-mendidik-semua-anak-dengan-sepenuh-hati>.

⁵ Winda Greatta Zakiah, Ravik Karsidi, dan Munawir Yusuf, “The Implementation of Inclusive Educational Policies in Elementary School,” *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 54, no. 1 (17 Maret 2021): 130–40, <https://doi.org/10.23887/jpp.v54i1.32210>.

⁶ Creswell, JW, *Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ilmiah metode campuran*, 2013.

⁷ Dhia Fitriah dan Meggie Ulyah Mirianda, “Kesiapan guru dalam menghadapi tantangan pendidikan berbasis teknologi,” 2019.

atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Menurut Dinn Wahyudin, pendidikan adalah humanisasi (upaya memanusiaikan manusia) yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia (peserta didik) agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya.⁸ Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga profesional untuk menyusun program pendidikan yang sesuai.

Konsep pendidikan inklusif muncul dengan tujuan untuk memberikan solusi atas perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang ada pada mereka. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, meningkatkan mutu pendidikan, dan ramah terhadap pembelajaran, serta memenuhi amanat Undang-Undang terkait hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan inklusif akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pendidikan inklusif bagi siswa antara lain memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keberagaman sejak dini, munculnya sikap empati secara alamiah, budaya saling menghargai dan menghormati, menurunnya stigma dan labeling, serta timbulnya budaya kooperatif dan kolaboratif antar siswa.

Pendidikan inklusif tidak hanya memiliki manfaat bagi anak disabilitas, namun pendidikan inklusif juga memiliki manfaat bagi anak tanpa disabilitas. Anak tanpa disabilitas yang menjadi teman sekelas anak disabilitas akan menjadi teman sekelas yang lebih empati, suka menolong, berbagi dan mendahulukan

⁸ Wahyudin, D, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009).

kepentingan teman yang lebih mementingkan.⁹ Pendidikan inklusif yang dilakukan di taman kanak-kanak juga memberikan manfaat bagi anak tanpa disabilitas, seperti meningkatkan keterampilan social, kerja sama dan komunikasi, serta penerimaan untuk anak disabilitas.¹⁰ Pendidikan inklusif mengajak anak untuk mengenal dan menghargai beragam karakteristik, bakat, dan temperamen.¹¹ Agar anak tanpa disabilitas maupun anak disabilitas mendapatkan manfaat optimal dari pendidikan inklusi, sangat penting bagi guru untuk memahami banyak karakteristik anak dan berkolaborasi merencanakan secara efektif proses pembelajaran. Namun, guru dan orang tua anak tanpa disabilitas yang belajar di pendidikan inklusif juga memiliki kekhawatiran tentang kepribadian dan keterampilan belajar dan perhatian guru terhadap anak tanpa disabilitas.¹²

Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) merilis data bahwa dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Lebih lanjut disampaikan bahwa dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.¹³

Untuk menjalankan amanah undang-undang pemerintah melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia termasuk dengan memberikan Piagam Penghargaan

⁹ Abdul Hafiz, "Sejarah dan perkembangan pendidikan inklusif di indonesia," *Jurnal As-Salam* 1, no. 3 (2017): 9–15.

¹⁰ Esther Ntuli dan Moussa Traore, "A study of Ghanaian early childhood teachers' perceptions about inclusive education," *The journal of the international Association of Special Education* 14, no. 1 (2013): 50–57; Bi Ying Hu dan Sherron Killingsworth Roberts, "When inclusion is innovation: An examination of administrator perspectives on inclusion in China," *Journal of School Leadership* 21, no. 4 (2011): 548–81.

¹¹ Olufemi Aremu Fakolade, Samuel Olufemi Adeniyi, dan Adeyinka Tella, "Attitude of teachers towards the inclusion of special needs children in general education classroom: the case of teachers in some selected schools in Nigeria," *International Electronic Journal of elementary education* 1, no. 3 (2009): 155–69.

¹² Geoff Lindsay, "Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/mainstreaming," *British journal of educational psychology* 77, no. 1 (2007): 1–24.

¹³ "Sekolah Inklusi Dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 1 Februari 2017, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>.

bagi Provinsi dan Kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif. Diantara Provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif diantaranya; Pada tahun 2012 dimulai oleh Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada tahun 2013 dilanjutkan oleh Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri dengan disusul oleh Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2015 hanya Provinsi Sumatera Utara yang tercatat mendeklarasikan diri. Baru pada tahun 2016 Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur menjadi Provinsi yang mendeklarasikan penyelenggara pendidikan Inklusif (diolah dari berbagai sumber).¹⁴

Kita bersyukur dengan provinsi-provinsi yang telah turut serta dalam mensukseskan program nasional ini untuk memberikan akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler dan bergaul dengan anak-anak normal lainnya. Tapi terkadang kita masih menyangkan 21 Provinsi yang “masih berfikir” untuk mendeklarasikan diri menjadi provinsi penyelenggara pendidikan inklusif sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan anak berkebutuhan khusus sudah sangat mendesak, dengan adanya Legal Standing dari masing-masing daerah, maka sekolah-sekolah yang ada di tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan akses, fasilitas, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan Pendidikan Inklusif itu sendiri. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa tidak 100% Provinsi-provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi provinsi penyelenggara Pendidikan Inklusif diamini oleh daerah-daerah tingkat Kabupaten/Kota yang berada di bawah garis komando mereka dengan berbagai alasan termasuk alasan klasik yaitu Hak Otonomi Daerah maupun keterbatasan anggaran. Begitu pula dengan berbagai macam kendala sekolah di Kabupaten/Kota lain yang berada dibawah provinsi-provinsi yang belum mendeklarasikan diri menjadi provinsi penyelenggara Pendidikan Inklusif, sedangkan mereka telah menyelenggarakan pendidikan inklusif secara mandiri.¹⁵

Meski demikian, jumlah tersebut tentu masih belum mencukupi mengingat total jumlah sekolah di Indonesia yang sangat besar. Tantangan untuk terus memperluas akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusi di seluruh wilayah Indonesia masih harus diupayakan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

¹⁴ Hafiz, “Sejarah dan perkembangan pendidikan inklusif di indonesia.”

¹⁵ Hafiz.

1. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi informasi tentang pendidikan inklusi kepada masyarakat luas.
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada tenaga pendidik dan kependidikan agar memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pembelajaran inklusif.
3. Menyediakan sarana prasarana yang memadai dan aksesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
4. Mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif.
5. Meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas disabilitas.

Upaya tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sehingga hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi dapat terpenuhi bagi seluruh anak di Indonesia.

Strategi Pendidikan Inklusif di Indonesia

Salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia adalah meningkatkan kualitas in-service training (INSET) kepada guru pendidikan inklusif, serta menyelenggarakan awareness programmes dan school-based professional development programmes.¹⁶ Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus.

Selain itu, perlu adanya perubahan peran Sekolah Luar Biasa (SLB) agar dapat menjadi pusat sumber untuk mendukung sekolah inklusif, dengan menyediakan alat bantu mengajar, materi ajar, metodologi, dan lainnya.¹⁷ Reorientasi pendidikan guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan keterlibatan universitas dalam program inklusif juga menjadi strategi yang perlu dilakukan.¹⁸

¹⁶ Maulana Arif Muhibbin dan Wiwin Hendriani, "Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review," *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 4, no. 2 (17 Juni 2021): 92–102, <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p92-102>.

¹⁷ Citra Nadia Sari dan Wiwin Hendriani, "Hambatan Pendidikan Inklusi Dan Bagaimana Mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis Dari Berbagai Negara," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (15 Januari 2021): 97–116, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>.

¹⁸ Muhibbin dan Hendriani, "Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia."

Desentralisasi pembuatan keputusan untuk memberikan lebih banyak peran kepada pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusif merupakan langkah strategis lainnya.¹⁹ Mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok kerja untuk mempromosikan pendidikan inklusif, serta keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi internasional juga menjadi strategi yang dapat diterapkan.²⁰

Menjalin jejaring antar berbagai pihak terkait, baik kerjasama dan kolaborasi secara regional, nasional, maupun internasional diperlukan untuk mengoptimalkan pendidikan inklusif di Indonesia.²¹ Pengembangan sekolah inklusif perintis dan pembukaan program magister dalam bidang inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus juga menjadi strategi penting.²²

Diseminasi ideologi pendidikan inklusif melalui seminar, lokakarya, pendidikan, dan pelatihan secara berkesinambungan menjadi strategi lain yang dapat dilakukan.²³ Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep pendidikan inklusif.

Terakhir, menyusun rencana aksi (*action plan*) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, dan kesejahteraan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi strategi yang tidak kalah penting.²⁴ Perencanaan dan pendanaan yang komprehensif dibutuhkan untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.

Tantangan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Meskipun konsep pendidikan inklusif telah diperkenalkan di Indonesia sejak beberapa dekade lalu, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusif, seperti kurangnya aksesibilitas fasilitas umum yang ramah bagi individu dengan disabilitas.²⁵ Fasilitas seperti bidang

¹⁹ Muhibbin dan Hendriani.

²⁰ Muhibbin dan Hendriani.

²¹ Muhibbin dan Hendriani.

²² Muhibbin dan Hendriani.

²³ W. Ekodjatmiko, "Pendidikan inklusi di Indonesia,," t.t., <http://id.scribd.com/doc/101514501/2/B-Sejarah-Perkembangan-Pendidikan-Inklusif>.

²⁴ Berit H Johnsen dan Miriam D Skjorten, "Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar," *Bandung: Unipub Forlaq*, 2003.

²⁵ Muhibbin dan Hendriani, "Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia"; Angela Genova, "Barriers to inclusive education in Greece, Spain and

landai/bidang miring, lift, guiding block, dan transportasi umum yang dapat diakses oleh individu dengan tuna daksa yang menggunakan kursi roda masih terbatas.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya pemahaman dan kompetensi yang dimiliki oleh para guru di sekolah inklusi.²⁶ Banyak guru yang belum memahami dan beradaptasi dengan siswa berkebutuhan khusus.²⁷ Selain itu, sistem kurikulum pendidikan umum yang berlaku saat ini masih belum mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus.²⁸ Kurikulum belum disesuaikan dengan prinsip pendidikan inklusif yang mengutamakan keberagaman dan pemenuhan kebutuhan individual peserta didik.

Stigma negatif dari masyarakat terhadap individu dengan disabilitas juga menjadi tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif.²⁹ Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu didukung oleh sarana, prasarana, serta sumber daya yang memadai, khususnya tenaga pendidik yang memiliki keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak berkebutuhan khusus.³⁰ Terakhir, kurangnya kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah, orangtua, masyarakat, dan organisasi lainnya juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pendidikan inklusif di Indonesia.³¹ Dibutuhkan sinergi dan dukungan dari multi-pihak untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas.

Lithuania: results from emancipatory disability research," *Disability & Society* 30, no. 7 (9 Agustus 2015): 1042–54, <https://doi.org/10.1080/09687599.2015.1075867>.

²⁶ Zakiah, Karsidi, dan Yusuf, "The Implementation of Inclusive Educational Policies in Elementary School."

²⁷ Brent C. Elder dan Bernard Kuja, "Going to school for the first time: inclusion committee members increasing the number of students with disabilities in primary schools in Kenya," *International Journal of Inclusive Education* 23, no. 3 (4 Maret 2019): 261–79, <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1432082>; Susanne Schwab, Umesh Sharma, dan Lisa Hoffmann, "How Inclusive Are the Teaching Practices of My German, Maths and English Teachers? – Psychometric Properties of a Newly Developed Scale to Assess Personalisation and Differentiation in Teaching Practices," *International Journal of Inclusive Education*, 2 Januari 2022, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603116.2019.1629121>.

²⁸ H Sukadari, "Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus," 2019.

²⁹ Muhibbin dan Hendriani, "Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia"; Genova, "Barriers to inclusive education in Greece, Spain and Lithuania."

³⁰ Edvina Bešić, Lisa Paleczek, dan Barbara Gasteiger-Klicpera, "Don't forget about us: attitudes towards the inclusion of refugee children with(out) disabilities," *International Journal of Inclusive Education* 24, no. 2 (28 Januari 2020): 202–17, <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1455113>.

³¹ Nissa Tarnoto, "Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD," *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal* 13, no. 1 (2 Februari 2016): 50–61, <https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>.

Strategi Solusi Tantangan Pendidikan Inklusif

Untuk mengatasi minimnya sarana penunjang pendidikan inklusif, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi individu dengan disabilitas. Hal ini meliputi penyediaan bidang landai, *lift*, *guiding block*, transportasi umum khusus, serta perbaikan akses di berbagai bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur baru harus mengintegrasikan prinsip-prinsip desain universal (*universal design*) agar dapat diakses oleh semua orang.

Untuk memaksimalkan program pendidikan inklusif, perlu melibatkan pekerja sosial seperti yang dikemukakan oleh Pryor, Kent, McGunn, & LeRoy (1996) bahwa pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial sekolah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pendidikan inklusif. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam upaya mewujudkan keberhasilan pendidikan inklusif, pekerja sosial perlu mempersiapkan siswa untuk menghormati perbedaan manusia, memfasilitasi proses transisi untuk siswa yang baru dimasukkan, berkonsultasi secara kolaboratif dengan guru, merevisi kurikulum sekolah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional, memberikan layanan kepada siswa dalam pengaturan pendidikan umum, dan memperluas konsep pendidikan inklusif di seluruh sekolah.³²

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang setara, berkualitas, dan tidak diskriminatif bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun konsep ini telah diperkenalkan di Indonesia sejak beberapa dekade lalu, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya sarana penunjang, terbatasnya kompetensi guru, kurikulum yang belum mengakomodasi keberagaman, stigma negatif masyarakat, manajemen sekolah yang kurang memadai, serta kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan. Namun, dengan strategi yang tepat seperti penyediaan infrastruktur aksesibel, peningkatan kapasitas guru, pengembangan kurikulum inklusif, kampanye kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, dan kolaborasi

³² Carolyn B Pryor dkk., "Redesigning social work in inclusive schools," *Social Work* 41, no. 6 (1996): 668–76.

multi-pihak, tantangan tersebut dapat diatasi sehingga hak atas pendidikan yang berkualitas dapat terpenuhi bagi seluruh anak di Indonesia.

Untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur aksesibel, pelatihan tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat membentuk badan khusus atau satuan tugas yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) juga perlu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan konsep pendidikan inklusif. Kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat luas perlu terus digalakkan untuk menghapus stigma negatif terhadap disabilitas. Pada akhirnya, sinergi dan keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, sekolah, orangtua, organisasi masyarakat, maupun komunitas penyandang disabilitas akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Indonesia.³³

REFERENSI

- Anwar, Muhammad Saiful. “Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural.” *Foundasia* 13, no. 1 (2022): 1–15.
- Bešić, Edvina, Lisa Paleczek, dan Barbara Gasteiger-Klicpera. “Don’t forget about us: attitudes towards the inclusion of refugee children with(out) disabilities.” *International Journal of Inclusive Education* 24, no. 2 (28 Januari 2020): 202–17. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1455113>.
- Creswell, JW. *Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ilmiah metode campuran*, 2013.
- Ekodjatmiko, W. “Pendidikan inklusi di Indonesia.” t.t. <http://id.scribd.com/doc/101514501/2/B-Sejarah-Perkembangan-Pendidikan-Inklusif>.
- Elder, Brent C., dan Bernard Kuja. “Going to school for the first time: inclusion committee members increasing the number of students with disabilities in primary schools in Kenya.” *International Journal of Inclusive Education* 23,

³³ Eko Setiawan dan Nurliana Cipta Apsari, “Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (AdD),” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 5, no. 3 (2019).

- no. 3 (4 Maret 2019): 261–79.
<https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1432082>.
- Fakolade, Olufemi Aremu, Samuel Olufemi Adeniyi, dan Adeyinka Tella. “Attitude of teachers towards the inclusion of special needs children in general education classroom: the case of teachers in some selected schools in Nigeria.” *International Electronic Journal of elementary education* 1, no. 3 (2009): 155–69.
- Farhan, Ahmad. “Implementasi Program Pendidikan Inklusi di SD Swasta Dua Mei Jalan Abdul Ghani Ciputat Tangerang Selatan (Studi Kasus Pendidikan Inklusif),” 2022.
- Fitriah, Dhia, dan Meggie Ullyah Mirianda. “Kesiapan guru dalam menghadapi tantangan pendidikan berbasis teknologi,” 2019.
- Genova, Angela. “Barriers to inclusive education in Greece, Spain and Lithuania: results from emancipatory disability research.” *Disability & Society* 30, no. 7 (9 Agustus 2015): 1042–54.
<https://doi.org/10.1080/09687599.2015.1075867>.
- Hafiz, Abdul. “Sejarah dan perkembangan pendidikan inklusif di indonesia.” *Jurnal As-Salam* 1, no. 3 (2017): 9–15.
- Hu, Bi Ying, dan Sherron Killingsworth Roberts. “When inclusion is innovation: An examination of administrator perspectives on inclusion in China.” *Journal of School Leadership* 21, no. 4 (2011): 548–81.
- Johnsen, Berit H, dan Miriam D Skjorten. “Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar.” *Bandung: Unipub Forlaq*, 2003.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Kemendikbudristek Ajak Ekosistem Pendidikan Mendidik Semua Anak Dengan Sepenuh Hati,” 12 Desember 2023.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/12/kemendikbudristek-ajak-ekosistem-pendidikan-mendidik-semua-anak-dengan-sepenuh-hati>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Sekolah Inklusi Dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi,” 1 Februari 2017.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>.
- Lindsay, Geoff. “Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/mainstreaming.” *British journal of educational psychology* 77, no. 1 (2007): 1–24.
- Muhibbin, Maulana Arif, dan Wiwin Hendriani. “Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review.”

- JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 4, no. 2 (17 Juni 2021): 92–102.
<https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p92-102>.
- Ntuli, Esther, dan Moussa Traore. "A study of Ghanaian early childhood teachers' perceptions about inclusive education." *The journal of the international Association of Special Education* 14, no. 1 (2013): 50–57.
- Pryor, Carolyn B, Carol Kent, Charlene McGunn, dan Barbara LeRoy. "Redesigning social work in inclusive schools." *Social Work* 41, no. 6 (1996): 668–76.
- Roslina, Lia, dan Rina Hizriyani. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah PAUD." *Motiva: Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2019): 32–36.
- Sari, Citra Nadia, dan Wiwin Hendriani. "Hambatan Pendidikan Inklusi Dan Bagaimana Mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis Dari Berbagai Negara." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (15 Januari 2021): 97–116.
<https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>.
- Schwab, Susanne, Umesh Sharma, dan Lisa Hoffmann. "How Inclusive Are the Teaching Practices of My German, Maths and English Teachers? – Psychometric Properties of a Newly Developed Scale to Assess Personalisation and Differentiation in Teaching Practices." *International Journal of Inclusive Education*, 2 Januari 2022.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603116.2019.1629121>.
- Setiawan, Eko, dan Nurliana Cipta Apsari. "Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (AdD)." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 5, no. 3 (2019).
- Sukadari, H. "Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus," 2019.
- Tarnoto, Nissa. "Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD." *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal* 13, no. 1 (2 Februari 2016): 50–61.
<https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>.
- Wahyudin, D. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Zakiah, Winda Greatta, Ravik Karsidi, dan Munawir Yusuf. "The Implementation of Inclusive Educational Policies in Elementary School." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 54, no. 1 (17 Maret 2021): 130–40.
<https://doi.org/10.23887/jpp.v54i1.32210>.